

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi. Tentara Indonesia terwujud karena keinginan rakyat, terutama para pemuda, yang merasa terpanggil untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan negaranya yang telah diproklamasikan.

Para pemuda itu mulanya tidak berfikir untuk menjadi tentara, tetapi secara spontan memenuhi panggilan tanah air dengan mengangkat senjata. Ini terjadi setelah penjajah tidak mau menerima proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 karena ingin tetap menjajah Indonesia. Pada masa itulah, pemuda Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui perjuangan bersenjata maupun secara diplomasi politik.¹

¹Abdoel Fattah, *Demilitarisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKIS, 2005), 42

Pada 3 Juni 1947, laskar-laskar dan TRI dalam tentara kebangsaan disatukan, dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejak itulah, tentara kebangsaan Indonesia dikenal sebagai TNI sampai kini. Proses pembentukan TNI secara resmi membutuhkan waktu yang panjang. TNI berasal dari berbagai golongan masyarakat, elemen, dan organisasi. Kelompok pergerakan yang dimaksudkan antara lain aialah PETA, KNIL, Laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang condong ke kiri (sosialis/komunis), Barisan Banteng yang dekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Hizbullah yang erat dengan Partai Islam Masyumi, Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), kumpulan orang-orang daerah, seperti Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) dan orang Batak Sumatera yang membentuk pasukan istimewa.²

Jenderal A. H. Nasution menegaskan bahwa Angkatan Darat tidak boleh ketinggalan dalam pelaksanaan program latihannya sebagaimana halnya pendidikan dan latihan militer telah diabaikan dalam tahun 1946-1949. Perwira yang ogah-ogahan untuk mengikuti pendidikan yang ekstensif, atau yang bersikap masabodoh terhadap keseluruhan program latihan itu, pada akhir 1950 diperingatkan bahwa “mereka yang tidak dapat memenuhi syarat untuk menduduki posisi yang lebih tinggi harus bersedia mengisi posisi yang lebih rendah. Ketentuan itu dibelakang hari akan menimbulkan

²Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKIS, 2005), 51-54

sebuah krisis besar di kalangan tentara, yang pada akhirnya berkembang menjadi krisis nasional.³

Pada periode tahun 1950-1952, perasaan antipati yang telah tertanam pada kaum militer terhadap kaum sipil semakin bertambah, walaupun pada masa Kabinet Natsir, (September 1950-Maret 1951) terdapat iklim kerjasama antara pemerintah Natsir (sipil) dengan militer yang cukup harmonis. Namun iklim tersebut hanya sebentar sekali, terutama sejak Kabinet Sukiman berkuasa (Maret 1951-Februari 1952). Pada Kabinet Wilopo, yaitu yang menggantikan Kabinet Sukiman, konflik antara kaum politisi (sipil) dengan militer mulai timbul lagi, yaitu dengan terjadinya suatu peristiwa yang bisa disebut Peristiwa 17 Oktober 1952.⁴

Berbicara tentang peristiwa 17 Oktober 1952 tentu tidak akan lepas dari kiprah Jenderal A. H. Nasution. Ia lahir di Kotanopan Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 dari ayah H. Abdul Halim Nasution dan ibu Hj. Zaharah Lubis. Nasution mengawali karirnya sebagai seorang guru di Bengkulu dan Batu Raja Palembang. Perkenalannya dengan dunia militer dimulai pada tahun 1940 sebagai siswa Corps Opleiding Reserve Officien (CORO) di Bandung kemudian diangkat sebagai Pembantu Letnan Calon Perwira (Cadet Vaandring) yang saat Jepang masuk ke Indonesia

³Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1986), 105

⁴Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 71-73

ditempatkan di Kebalen Surabaya. Pada zaman Jepang tahun 1942-1945 A. H. Nasution sebagai pegawai Kota Praja Bandung kemudian berhenti bergabung dengan Angkatan Muda Bandung dan diangkat sebagai wakil Komandan Batalion Pelopor.⁵

Itulah sedikit gambaran Peranan Jenderal A. H. Nasution dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Oleh karena itu ia adalah pelopor pahlawan militer. Sebagai wujud rasa menghargai jasa Jenderal A. H. Nasution dalam kiprahnya yang berperan banyak dalam kemiliteran, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi yang disuguhkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peranan Jenderal A. H. Nasution Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas disimpulkan bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah “Peranan Jenderal A. H. Nasution Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952”, selanjutnya penulis mencoba merumuskan ini dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Bagaimana Biografi Jenderal A. H. Nasution ?
2. Bagaimana Jalannya Peristiwa 17 Oktober 1952 ?
3. Bagaimana Peranan Jenderal A.H. Nasution Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952 ?

⁵A. H. Nasution, *Pokok-Pokok Grilya* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 1953), 1

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk terwujudnya deskripsi yang menerangkan tentang :

1. Biografi Jenderal A. H. Nasution.
2. Jalannya Peristiwa 17 Oktober 1952.
3. Peranan Jenderal A.H. Nasution Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952.

D. Kerangka Pemikiran

Teori sejarah menurut R. Moh. Ali dalam bukunya “Pengantar Ilmu Sejarah” mengatakan bahwa gerak sejarah disebabkan oleh manusia yang berjiwa besar seperti peranan pahlawan, baik pahlawan kemerdekaan dan kemanusiaan, maupun pahlawan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris, sejarah sangat tergantung dengan pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen, dan dokumen-dokumen itulah yang diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta, dan sejarah mempunyai objek, yaitu waktu. Waktu dalam pandangan sejarah tidak pernah lepas dari manusia.⁶

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan. Peranan adalah merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial

⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 46

masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.⁷

Militer merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisasi dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang dibedakan dari orang-orang sipil menurut Finer. Tujuan pokoknya untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara⁸.

Keterlibatan militer Indonesia dalam politik mempunyai akar dan latar belakang yang panjang. Namun, pada awal pembentukannya, kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dirancang sebagai alat pertahanan negara saja. Keadaanlah yang kemudian membuat TNI berubah dan terlibat dalam percaturan politik. Kaum militer campur tangan dalam politik karena beberapa faktor, yaitu: keadaan yang menuntutnya lantaran dalam situasi perang kemerdekaan dicemooh dan dipojokkan oleh elit sipil secara tidak wajar, kegagalan pemimpin dan elite sipil dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi dan ditarik ke arena politik dan dijadikan alat kekuasaan politik.

⁷Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 735

⁸Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 1

Perang melawan Belanda mengakibatkan kekosongan pemerintah di daerah, yang menyebabkan militer mengisinya untuk menjalankan pemerintahan. Sementara cemoohan anggota parlemen yang tidak wajar terhadap TNI telah menyebabkan campur tangan tentara dalam urusan politik dengan mengusulkan pembubaran parlemen, yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952.⁹

E. Metode Penelitian

Mengenalkan cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Langkah-langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik intern dan ekstern, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk tulisan. Perlu diperbanyak praktik penelitian untuk mendapat keterampilan.¹⁰

1. Tahapan Heuristik

Tahapan Heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik secara tertulis maupun secara lisan.¹¹ Dalam tahapan heuristik, penyusun mengadakan studi perpustakaan di beberapa perpustakaan umum, perpustakaan pribadi dan beberapa rekan mahasiswa. Adapun perpustakaan umum yang penyusun kunjungi adalah Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan tidak lupa penulis

⁹Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKIS, 2005), 1-2

¹⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 64

¹¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 73

membrowsing data menggunakan internet. Dari kunjungan perpustakaan ini penyusun berhasil mengumpulkan beberapa jilid buku yang menunjang pada penelitian ini. Dari sekian buku yang dijadikan sumber data primer adalah sebagai berikut :Nasution A. H. *Pokok-Pokok Gerilya*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 1953. Nasution A. H. *Peristiwa 17 Oktober 1952*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010. Nasution. A.H, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid: I Kenangan Masa Muda*, Jakarta: Haji Masagung, 1982. Nasution. A.H, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid III: Masa Pancaroba Pertama*, Jakarta: Haji Masagung, 1982. Nasution. A.H, *Bisikan Nurani Seorang Jenderal*, Bandung: Mizan Pustaka, 1997. Dari sekian buku yang dijadikan sumber data sekunder adalah sebagai berikut: Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013. Pambudi. A. *Super Semar Palsu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 2006. Muhaimin Yahya. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. Suhandhaussen Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta: LP3ES, 1986. Kartodirjo Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Darminta Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985. Fattah Abdoel, *Demiliterasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Jakarta: LKIS, 2005. Anshory Nasruddin, *Seri Satu Abad Kebangkitan Nasional, Bangsa Gagal: Mencari Identitas*

Kebangsaan, Yogyakarta: LKiS Pelangi, 2008. Mansyur Suryanegara Ahmad, *Api Sejarah 2* Bandung: Salamadani, 2010. Yayasan Kasih Adik, *Mengawal Nurani Bangsa Jenderal Besar Dr. A. H. Nasution. Jilid I: Kenangan Masa Purnawirawan*, Jakarta: CV. Ami Global Media, 2008. Yayasan Kasih Adik, *Mengawal Nurani Bangsa Jenderal Besar Dr. A. H. Nasution. Jilid II: Kepemimpinan Nasional dan Pemimpin Bangsa*, Jakarta: CV. Ami Global Media, 2008. Sumiyati Lilis, *Rekam Jejak Jenderal Abdul Haris Nasution dalam Bidang Militer dan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1940-1965*, Serang: IAIN BANTEN, 2012. Warman Asvi, *Seabad Kontroversi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007). Warman Asvi, *1965: Orang-Orang Dibalik Tragedi*, Yogyakarta: Galang Press, 2009. M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi. 2008. Abu Nain Nazwir, *Angkatan 66 Dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Cipro Media, 2011. Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A. H. Nasution*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998.

2. Tahapan Kritik

Tahapan kritik adalah tahapan penyeleksian dan pengujian data baik secara ekstern maupun intern. Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahapan berikutnya adalah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal

ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.

Dalam melakukan kritik intern, penyusun menyeleksi materi-materi mana yang mendukung penelitian. Sehingga setelah diseleksi, penulis dapat mengategorikan mana data yang menjadi sumber primer dan mana yang menjadi sumber skunder.

3. Tahapan Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahapan kegiatan penafsiran fakta untuk memberikan makna dan penertian serta menghidupkan kembali (*Relifing*) proses sejarah. Dalam tahapan ini fakta-fakta yang saling terlepas dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan, mencantumkan fakta dan keterangan dari mana fakta itu di peroleh.¹²

Karena penulis tidak mengalami dan tidak menyaksikan sendiri kurun waktu tersebut, yaitu kurun yang menjadi bahan kajian dalam penelitian skripsi ini, maka fakta yang ada dijadikan sebagai landasan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu ke dalam dimensi masa kini.

¹²Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 100

4. Tahap Historiografi

Tahapan historiografi adalah tahapan penulisan untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, historiografi adalah tahapan lanjutan dari tahapan interpretasi yang kemudian hasilnya menjadi kisah yang selaras.

Pada tahapan ini penyusun menggunakan jenis penulisan deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta guna menjawab apa, siapa, bagaimana, dan mengapa.

Demikian empat tahapan penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melihat tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan karya sejarah ilmiah dan lebih mendapatkan peristiwa sebenarnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulisan membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Biografi Jendral A. H. Nasution meliputi tentang: Riwayat Hidup Jendral A. H. Nasution, Latar Belakang Pendidikan

Jendral A. H. Nasution, dan Pengalaman Organisasi Jendral A. H. Nasution.

Bab Ketiga: Jalannya Peristiwa 17 Oktober 1952 meliputi tentang: Kondisi Politik di Lingkungan Angkatan Darat, Latar Belakang Peristiwa 17 Oktober 1952, Jalannya Peristiwa 17 Oktober 1952, Dampak Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 di Lingkungan Angkatan Darat.

Bab Keempat: Peranan Jendral A. H. Nasution Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952 Meliputi Tentang: Memimpin Jalannya Demonstrasi, Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952, Menjalani Masa Transisi, Tetap Perhatian Pada Urusan Kenegaraan.

Bab Kelima: Penutup yang berisi: Kesimpulan dan Saran-Saran.